
Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk : Kasus Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

[Perception of Subdistricts and Village Officers on Reservoir Existence: The Case of Jatigede Reservoir, Sumedang, West Java]

Nayu Nurmalia, Tuti Susilawati

Jurusan Penyuluhan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan
Jalan Cikaret No. 2, Bogor Selatan, Kota Bogor 16132

Diterima : 20 Februari 2019; Disetujui : 14 Maret 2019

Abstrak

Waduk Jatigede yang berada di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Ir. H. Juanda (Waduk Jatiluhur). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan waduk dan mengidentifikasi harapan masyarakat terhadap keberadaan waduk Jatigede. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 26 orang. Responden merupakan perangkat kecamatan dan perangkat desa bekerja di wilayah Waduk Jatigede yang kecamatan dan desanya terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Selain banyaknya manfaat, menurut para perangkat tersebut pembangunan waduk Jatigede juga memiliki dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan masyarakat. Sejumlah permasalahan timbul dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede, yaitu masalah ganti rugi, masalah pekerjaan baru bagi OTD, kesiapan OTD untuk dapat menerima pekerjaan yang baru, serta permasalahan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan pemerintah.

Kata kunci : dampak, perangkat desa/kecamatan, persepsi, Waduk Jatigede

Abstract

The Jatigede Reservoir in Sumedang Regency, West Java Province, is the second largest reservoir in Indonesia after the Ir. H. Juanda (Jatiluhur Reservoir). The purpose of this study is to identify perceptions of the village and sub-district officials on the existence of the reservoir and identify community expectations of the existence of the Jatigede reservoir. The number of respondents in this study was 26 people. Respondents are sub-district and village officials working in the Jatigede Reservoir area, where the sub-districts and villages are affected by the construction of the Jatigede Dam. In addition to the many benefits, according to these officials the construction of the Jatigede reservoir also have a couple of impacts on people's lives. Various problems arise with the construction of the Jatigede Dam, namely the problem of compensation, the problem of new job opportunities for the OTD, the readiness of the OTD to be able to accept new jobs, and the productive economic problems of the community that have been carried out by the government.

Keywords: impact, Jatigede Dam, perception, village/sub-district officers

Penulis Korespondensi

Nayu Nurmalia | nayunumalia@yahoo.com

PENDAHULUAN

Waduk Jatigede yang berada di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Ir. H. Juanda (Waduk Jatiluhur). Pembangunan waduk ini mengalami waktu yang cukup lama, dari mulai perencanaan, pembangunan sampai resmi digenangi air. Selain itu pembangunan Waduk Jatigede tentu menelan biaya yang tidak sedikit.

Lamanya pembangunan Waduk Jatigede ini berdampak berbagai permasalahan yang menghambat penyelesaian Waduk Jatigede yaitu: pembangunan fisik yang belum final dan masalah sosial, ekonomi dan budaya yang belum teratasi. Masyarakat menuntut keadilan untuk ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan, menuntut uang, menuntut relokasi yang layak dan jelas, sampai meminta pertanggungjawaban pemerintah tentang bakal musnahnya situs-situs dan adat istiadat yang secara turun temurun diwariskan leluhurnya (Purnama 2015). Dampak lainnya terkait pembangunan Waduk Jatigede yaitu perubahan sosial mata pencaharian masyarakat orang terkena dampak (OTD) (Harliani 2014).

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan waduk tidak terlepas dari keterkaitannya dengan campur-tangan, intervensi, maupun kontribusi dari sejumlah pihak, dalam skala lembaga,

maupun dalam tingkat individu. Pihak-pihak tersebut dapat meliputi lembaga-lembaga lingkup Kementerian PUPR, Kementerian DN, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan perangkat tingkat desa. Individu yang terkait dapat menjadi bagian dari lembaga-lembaga tersebut, dapat pula merupakan individu yang lebih bersifat mandiri (Heriyanto 2014).

Mengingat kedekatannya secara geografis dengan wilayah waduk, perangkat kecamatan dan perangkat desa dinilai sebagai individu yang dinilai berpengaruh secara nyata terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan waduk. Karakteristik para perangkat kecamatan maupun perangkat desa, terutama dari sisi persepsinya terhadap keberadaan dan pengelolaan waduk, diduga akan memberikan pengaruh nyata terhadap keberadaan maupun pengelolaan waduk di lokasi para perangkat tersebut berada. Kajian dengan demikian diarahkan untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan persepsi perangkat kecamatan dan perangkat desa dalam kaitannya dengan keberadaan dan pengelolaan waduk yang berada di wilayah mereka. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelaah hal tersebut secara lebih mendalam.

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi karakteristik internal perangkat desa dan kecamatan di wilayah yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.
2. Mengidentifikasi persepsi perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan waduk.
3. Mengidentifikasi harapan masyarakat terhadap keberadaan waduk Jatigede.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di wilayah Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober–Desember 2017. Objek dalam penelitian adalah perangkat kecamatan dan perangkat desa yang bekerja di kecamatan dan desa terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang.

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan cara *quota sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dengan jumlah populasi yang tidak diperhitungkan, tapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok (Puspitawati dan Herawati 2013). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan data jumlah data perangkat Desa dan perangkat Kecamatan, sehingga jumlah populasi tidak diketahui. Jumlah responden yang digunakan

sebanyak 26 orang. Responden merupakan perangkat kecamatan dan perangkat desa bekerja di wilayah Waduk Jatigede yang kecamatan dan desanya terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede dan relatif homogen.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data persepsi perangkat desa dan perangkat kecamatan di daerah yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede melalui wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan pustaka yang relevan. Data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode Skala Likert. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waduk Jatigede merupakan salah satu waduk yang berada di Provinsi Jawa Barat dan merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Ir. H. Juanda (Waduk Jatiluhur). Waduk ini dibangun dengan membendung aliran

Tabel 2. Sebaran Umur Responden

No	Umur Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	21 – 30	3	12
2	31 – 40	4	15
3	41 – 50	8	31
4	51 – 60	11	42
Jumlah		26	100

Tabel 3. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	1	4
2	SLTP	2	8
3	SLTA	16	61
4	D3	1	4
5	Strata 1	6	23
Jumlah		26	100

Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Waduk ini mulai digenangi secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2015 (Asiyanto 2011).

Manfaat dari Waduk Jatigede diperkirakan dapat menjamin irigasi hingga 90.000 hektar, menghasilkan pasokan listrik sebesar 110 megawatt, dan dapat mengurangi banjir. Waduk ini dapat menyediakan air bersih bagi Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan kawasan sekitarnya dengan kapasitas 3.500 liter.detik⁻¹, serta memasok air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik sebesar 690 GWH per tahun

dengan kapasitas 110 MW (Purnama 2015).

Karakteristik Internal Responden

Karakteristik internal responden meliputi umur dan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebaran umur responden antara 21 tahun – 60 tahun (Tabel 2). Mayoritas kisaran umur responden berada pada kisaran umur 51-60 tahun sebanyak 42% dan umur 41-50 tahun (31%), sehingga diperoleh persentase terbesar pada kisaran umur 41-60 tahun sebanyak 73%.

Tabel 4. Persepsi responden tentang manfaat keberadaan Waduk jatigede

No	Pernyataan Manfaat keberadaan Waduk Jatigede	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a.	Menambah luasan sawah yang dapat diari	1	4
b.	Memperluas kesempatan penangkapan ikan	9	34,5
c.	Menambah pilihan daerah wisata air dan wisata kuliner	9	34,5
d.	Memperbesar kemampuan penyediaan air bagi kebutuhan sehari-hari	1	4
e.	Tidak bermanfaat	6	23
Jumlah		26	100

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden sangat beragam, mulai dari tamat SD sampai tamat perguruan tinggi (Strata 1). Berdasarkan data pada Tabel 3, sebagian besar pendidikan responden adalah SLTA yakni sebesar 62%. Pendidikan responden terbanyak kedua adalah Strata 1 sebanyak 23%. Selanjutnya masing-masing sebanyak 4%, pendidikan responden tamat D3 dan tamat SD.

Persepsi Responden tentang Manfaat Keberadaan Waduk Jatigede

Pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengairi areal irigasi seluas 90.000 hektar; pengendalian banjir di daerah Indramayu, Cirebon, dan sekitarnya; melayani kebutuhan air bersih Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan

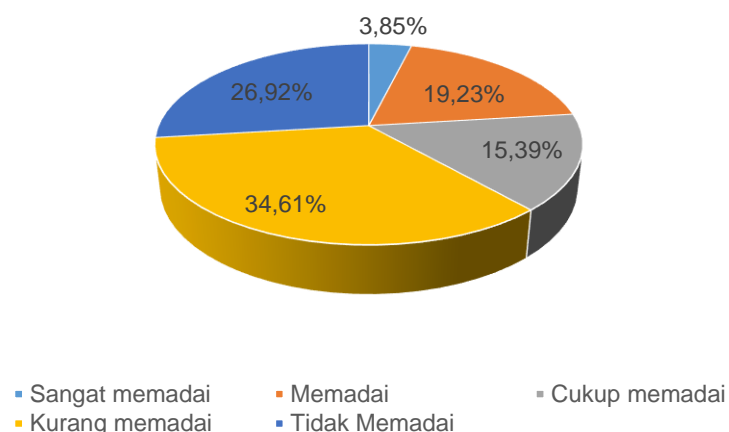
kawasan Balongan dengan kapasitas 3.500 liter.detik⁻¹. Air yang telah dibendung tersebut dapat dimanfaatkan potensinya untuk keperluan sehari-hari dan sebagai cadangan di musim kemarau (Simanjuntak dan Mahida 2015).

Hasil analisis tentang manfaat keberadaan Waduk Jatigede (Tabel 4) dapat dilihat bahwa persepsi responden terhadap manfaat waduk sebagian besar adalah untuk memperluas kesempatan penangkapan ikan (34,5%) dan menambah pilihan daerah wisata air dan wisata kuliner (34,5%). Selanjutnya sebanyak 23% menyatakan tidak bermanfaat. Hal tersebut menurut responden karena lahan persawahan semakin sedikit, sedangkan mayoritas masyarakat belum bisa memanfaatkan lahan perairan yang ada, disebabkan masih minimnya keterampilan dan kemampuan di bidang perikanan, wisata air dan wisata kuliner. Oleh karena itu

Tabel 5. Persepsi Responden tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk Jatigede

No	Pernyataan	SM		M		CM		KM		TM	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah pusat	1	3,85	5	19,23	4	15,39	9	34,61	7	26,92
2	Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	3,85	6	23,08	2	7,69	10	38,46	7	26,92
3	Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang	1	3,85	3	11,54	6	23,08	11	42,31	5	19,23

*) SM=Sangat memadai; M=Memadai; CM=Cukup memadai; KM=Kurang memadai, TM=Tidak memadai

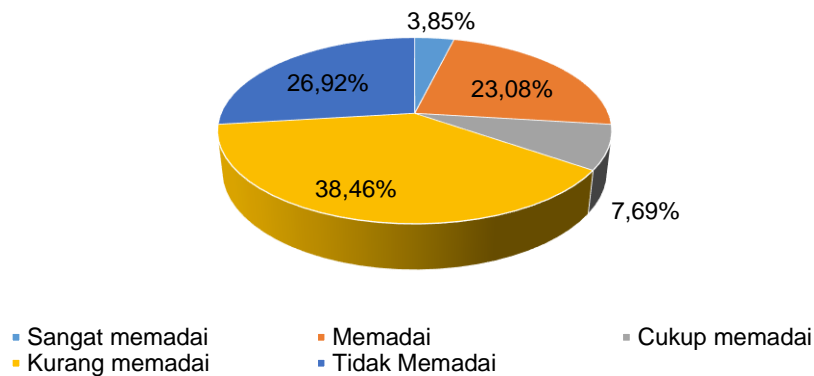


Gambar 1. Persepsi tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk yang dilakukan Pemerintah Pusat

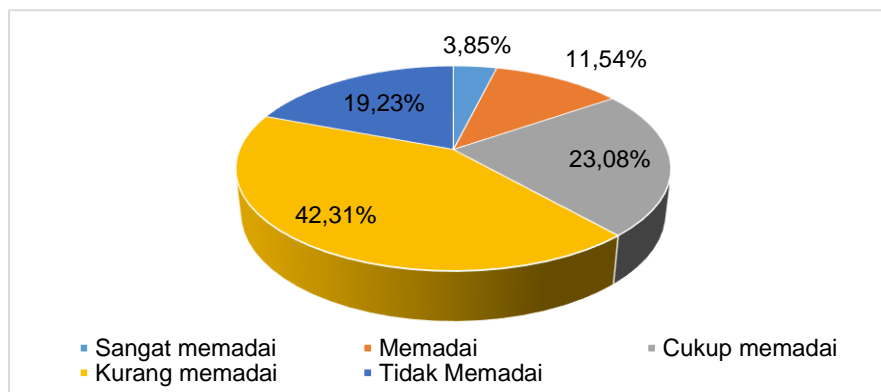
harapan mereka diperlukan adanya bimbingan teknis dan bantuan sarana/alat tangkap dan penunjang lainnya, serta infrastruktur yang terputus akibat genangan segera dibangun penggantinya, sehingga pengembangan wisata tidak terhambat.

Persepsi Responden tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk Jatigede yang Dilakukan Pemerintah

Persepsi responden tentang sosialisasi pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 5.



Gambar 2. Persepsi tentang sosialisasi pembangunan waduk yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Gambar 3. Persepsi tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang

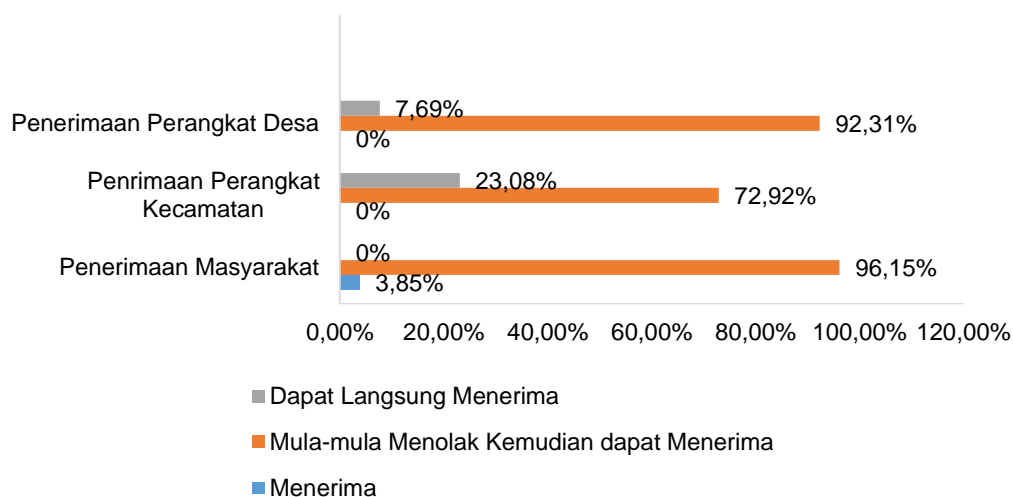
Berdasarkan data hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pembangunan waduk yang dilakukan pemerintah pusat kurang memadai (34,61%) dan tidak memadai (26,92%). Responden mengatakan bahwa sosialisasi tidak jelas dan tidak merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat bawah, masyarakat banyak yang tidak tahu, sehingga penyelesaian dampak sosial ekonomi pembangunan waduk belum tuntas.

Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut responden sebagian besar menyatakan kurang memadai (38,46%) dan tidak memadai (26,92%). Responden menyatakan bahwa dalam setiap tahapan pembangunan waduk Jatigede tidak transparan, banyak hal yang tidak diketahui masyarakat, apalagi menyangkut proses pendataan subjek dan objek ganti rugi serta besaran nilainya. Tidak pernah secara khusus ada sosialisasi tentang pembangunan waduk

Tabel 6. Penerimaan masyarakat, perangkat kecamatan dan perangkat desa terhadap keberadaan Waduk Jatigede

No	Persepsi Responden	M		MMKM		DML	
		∑	%	∑	%	∑	%
1	Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan waduk Jatigede	1	3,85	25	96,15	0	0
2	Penerimaan perangkat kecamatan terhadap keberadaan waduk Jatigede	0	0	20	76,92	6	23,08
3	Penerimaan perangkat Desa terhadap keberadaan waduk Jatigede	0	0	24	92,31	2	7,69

*) M=Menerima; MMKM=Mula-mula menolak kemudian dapat menerima; DML=Dapat menerima langsung



Gambar 4. Persepsi Penerimaan Masyarakat, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa terkait Keberadaan Waduk Jatigede

termasuk manfaatnya bagi masyarakat luas. Sosialisasi tidak merata ke segenap masyarakat khususnya masyarakat dengan tingkat SDM menengah ke bawah. Sosialisasi kurang memadai karena sosialisasi sangat minim dilakukan oleh pihak Provinsi.

Hasil analisis persepsi perangkat kecamatan dan perangkat desa menyatakan bahwa sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang

sebagian besar (42,31%) kurang memadai. Sosialisasi tidak secara menyeluruh, karena mereka menyatakan bahwa pembangunan waduk merupakan proyek pusat, sehingga banyak warga yang tidak paham terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan waduk Jatigede. Panjangnya rentang waktu pembangunan waduk menyisakan banyak masalah. Selanjutnya sebagian responden menyatakan sosialisasi

tentang pembangunan waduk yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang cukup memadai (23,08%) dan memadai (11,54%). Responden mengatakan bahwa pemerintah kabupaten justru yang paling berperan dalam sosialisasi pembangunan waduk, karena keluhan, pertanyaan dan penolakan dibangunnya Waduk Jatigede lebih sering ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang.

Penerimaan Masyarakat, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk Jatigede

Berdasarkan data hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa persepsi penerimaan masyarakat; perangkat desa dan perangkat kecamatan, sebagian besar adalah mula-mula menolak kemudian dapat menerima, yaitu masing-masing persentase 96,15%; 76,92%, dan 92,31%. Perangkat kecamatan sebanyak 23,08% menyatakan dapat menerima langsung terhadap keberadaan waduk, karena sebagai aparat pemerintah yang merupakan kepanjangan tugas dari Kabupaten Sumedang, responden menganggap sudah diharuskan mendukung program pemerintah dan memang adanya waduk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Partisipasi Masyarakat, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa dalam Setiap Kegiatan Pertemuan Terkait dengan Waduk Jatigede

Partisipasi menurut Hafizianor (2009) mengandung pengertian peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang secara sadar yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini perangkat Kecamatan dan perangkat desa dalam kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede disajikan pada Tabel 7.

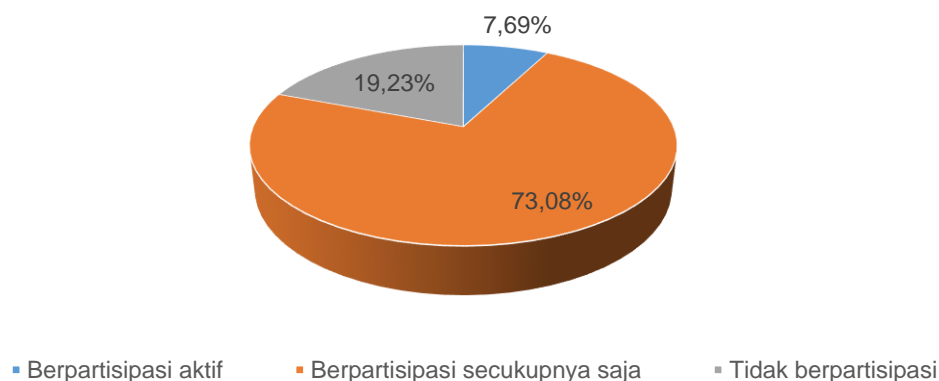
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede sebagian besar pada kategori berpartisipasi secukupnya saja (73,08%). Responden menyatakan bahwa jarang dilakukan kegiatan pertemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalaupun ada hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang ikut atau berpartisipasi, dan belum melibatkan masyarakat secara umum.

Partisipasi perangkat kecamatan dan partisipasi perangkat desa menunjukkan pada kategori berpartisipasi secukupnya saja yaitu masing masing 61,54% dan 73,08%. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan apabila diperlukan untuk berpartisipasi atau sesuai dengan tugas yang diperintahkan dari atasan.

Tabel 7. Partisipasi masyarakat, perangkat kecamatan dan perangkat desa dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede

No	Pernyataan	BA		BSS		TB	
		∑	%	∑	%	∑	%
1	Apabila masyarakat menerima keberadaan waduk Jatigede, bagaimana partisipasi atau keterlibatan dalam setiap kegiatan atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede	2	7,69	19	73,08	5	19,23
2	Apabila perangkat Kecamatan menerima keberadaan waduk Jatigede, bagaimana partisipasi atau keterlibatan dalam setiap kegiatan atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede	5	19,23	16	61,54	5	19,23
3	Apabila perangkat Desa menerima keberadaan waduk Jatigede, bagaimana partisipasi atau keterlibatan dalam setiap kegiatan atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede	5	19,23	19	73,08	2	7,69

*) BA=Berpartisipasi aktif; BSS=Berpartisipasi secukupnya saja; TB=Tidak berpartisipasi



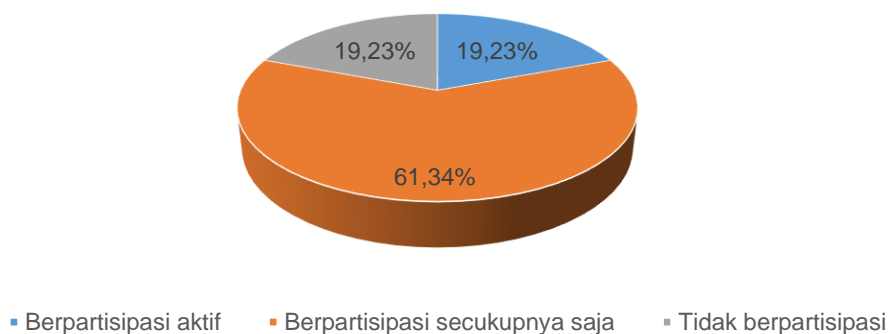
Gambar 5. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede

Selanjutnya responden (perangkat kecamatan dan perangkat desa) yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede masing-masing sebesar 19,23%. Responden ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertemuan, karena sinergitas program pemerintah baik kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat, artinya mereka ikut berpartisipasi

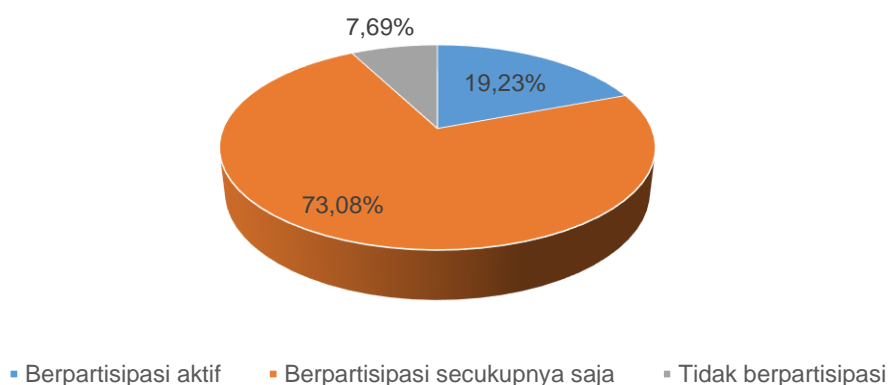
dalam setiap kegiatan terkait untuk menyukseskan keberadaan waduk Jatigede.

Persepsi tentang Penyelesaian Masalah bagi Masyarakat Objek Terkena Dampak (OTD)

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede terdapat di wilayah lima kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Jatigede,



Gambar 6. Partisipasi perangkat kecamatan dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede



Gambar 7. Partisipasi perangkat desa dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede

Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal dan Kecamatan Cisitu. Dari lima Kecamatan tersebut ada 28 desa yang terkena dampak (Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015). Lamanya pembangunan Waduk Jatigede yaitu kurang lebih 34 tahun (tahun 1982 sampai tahun 2015) memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.

Berbagai permasalahan timbul dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede yaitu masalah ganti rugi, masalah pekerjaan baru bagi OTD,

kesiapan OTD untuk dapat menerima pekerjaan yang baru serta permasalahan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan pemerintah. Persepsi terhadap penyelesaian masalah bagi OTD disajikan pada Tabel 8.

Persepsi responden terhadap proses penyelesaian masalah ganti rugi bagi OTD sebagian besar menyatakan bahwa penyelesaian ganti rugi pada kategori tidak baik (42,31%) dan sangat tidak baik (34,61%). Menurut responden permasalahan ganti rugi belum tuntas, ada hak warga masyarakat yang terlewat

Tabel 8. Persepsi tentang proses penyelesaian masalah bagi Obyek yang Terkena Dampak (OTD) terkait dengan Waduk Jatigede

No	Pernyataan	SB		B		CB		TB		STB	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Proses penyelesaian masalah ganti rugi terkait dengan waduk Jatigede	0	0	3	11,54	3	11,54	11	42,31	9	34,61
2	Proses penyelesaian masalah pekerjaan baru bagi OTD	0	0	1	3,85	1	3,85	10	38,46	14	53,84
3	Kesiapan OTD untuk dapat menerima pekerjaan yang baru	4	15,38	2	7,69	16	61,54	3	11,54	1	3,85
4	Penyelesaian kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah	0	0	1	3,85	6	23,08	10	38,46	9	34,61

*) SB=Sangat baik; B=Baik; CB=Cukup baik; TB=Tidak baik; STB=Sangat tidak baik

dan salah sasaran. Selanjutnya persepsi pada kategori baik dan cukup baik masing-masing sebesar 11,54%, hal ini responden kemukakan karena penyelesaian ganti rugi di Desa Pawenang sudah tuntas, walaupun dilakukan secara bertahap.

Persepsi tentang proses penyelesaian masalah pekerjaan baru bagi OTD, sebagian besar pada kategori tidak baik (38,46%) dan sangat tidak baik (53,84%). Responden menyatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya bermatapencaharian utama pada sektor pertanian, masih menganggur dan tidak memiliki kegiatan usaha yang dapat menjamin kelayakan hidup masyarakat. Lapangan pekerjaan baru yaitu penangkapan ikan, masih kendala

karena belum memiliki keterampilan dan sarana prasarana yang memadai sesuai potensi lahan yang tersedia saat ini. Persepsi responden tentang kesiapan OTD untuk dapat menerima pekerjaan baru pada kategori cukup baik (61,54%). Responden menyatakan bahwa masyarakat cukup siap, apabila pekerjaan yang disediakan dapat dilakukan dengan sesuai kemampuan mereka dan menjamin kelangsungan hidup serta memulihkan kondisi perekonomian OTD secara menyeluruh. Menurut Rostiyati (2014), ketika lingkungan alam berubah dari pertanian menjadi sebuah genangan waduk dalam areal yang luas, maka kemungkinan besar terjadi perubahan aktivitas. Purnama (2015) menyatakan bahwa

dampak sosial lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dampak kepada masyarakat yang mengalami perubahan sosial dari masyarakat pertanian ke masyarakat nelayan. Dampak ini memang harus dipersiapkan karena beralihnya profesi akan mengubah sosial budaya masyarakat setempat. Secara psikologis harus dipersiapkan agar masyarakat tidak stres terhadap perubahan tersebut. Masyarakat akan siap menerima perubahan tersebut, sehingga mereka tidak lagi kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Proses perubahan mata pencaharian dan dampaknya kepada masyarakat harus dipersiapkan secara matang dan sistematis (Schermerhorn, Hunt, dan Osborn 2010). Perlu disiapkan mentalitas dan kesiapan lainnya kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengalami dampak kaget atau stres terhadap perubahan tersebut. Dengan pembangunan Waduk Jatigede ini masyarakat setempat dapat lebih sejahtera dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Pada dasarnya semua orang atau kelompok masyarakat memiliki *power* atau kekuatan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal atau lingkungan tempat mereka berada (Rakhmat 2011).

Penyelesaian kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah pada kategori

tidak baik (38,46%) dan kategori sangat tidak baik (34,61%). Menurut responden, penyelesaian ekonomi produktif baru rencana, belum ada konsep atau penerapan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat OTD yang berdampak pula terhadap kondisi “rawan” dalam segala hal. Sementara sebagian responden (23,08%) menyatakan cukup baik. Responden mengatakan bahwa sudah dilakukan kerjasama pemerintah Desa dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan di beberapa desa sudah dilakukan pelatihan guna peningkatan ekonomi produktif.

Penerimaan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Peraturan Waduk Jatigede

Keberadaan Waduk Jatigede tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus dijalankan dengan baik oleh masyarakat, sehingga Waduk Jatigede dapat terjaga kelestariannya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah larangan membuat Keramba Jaring Apung (KJA), peraturan perikanan tangkap yang hanya dapat dilakukan di Waduk Jatigede, pentingnya upaya konservasi atau pelestarian lingkungan, pentingnya upaya konservasi atau pelestarian wilayah perairan, pentingnya menetapkan zonasi atau pembangian

Tabel 9. Penerimaan dan Tanggapan Masyarakat tentang Peraturan Terkait Waduk Jatigede

No	Pernyataan	SDB		DM		CDM		TDM		STD	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Masyarakat dapat menerima peraturan larangan KJA	4	15,38	3	11,54	3	11,54	15	57,69	1	3,85
2	Masyarakat dapat menerima peraturan hanya perikanan tangkap yang dapat dilakukan di waduk Jatigede	4	15,38	1	3,85	7	26,92	14	53,85	0	0
3	Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi atau pelestarian lingkungan	10	38,46	9	34,61	7	26,92	0	0	0	0
4	Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi atau pelestarian wilayah perairan	10	38,46	11	42,31	5	19,23	0	0	0	0
5	Tanggapan masyarakat tentang pentingnya menetapkan Zonasi atau pembagian wilayah penangkapan ikan di waduk Jatigede	9	34,61	6	23,08	3	11,54	8	30,77	0	0
6	Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya pengawasan oleh masyarakat setempat melalui POKMASWAS	7	26,92	15	57,69	2	7,69	2	7,69	0	0

*) SDB=Sangat dapat menerima; DM=Dapat menerima; CDM=Cukup dapat menerima; TDM=Tidak dapat menerima; STD=Sangat tidak dapat menerima

wilayah penangkapan ikan di Waduk Jatigede, dan pentingnya upaya pengawasan oleh masyarakat setempat melalui POKMASWAS. Penerimaan dan tanggapan masyarakat tentang peraturan terkait Waduk Jatigede pada Tabel 9.

Responden memiliki harapan bagi mereka dengan adanya Waduk Jatigede sertasaran perbaikan di masa

mendatang. Perairan umum termasuk Waduk Jatigede sebagai sumberdaya yang dimiliki harus memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Waduk yang mempunyai manfaat ekologis, ekonomi dan sosial merupakan manfaat yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat (Saifuddin 2007). Oleh karena itu, pelestarian Waduk Jatigede menjadi mutlak untuk dijaga dan

diterapkan. Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang terdiri dari pelaku utama perikanan, tokoh adat, LSM, tokoh agama dll, perannya sangat penting untuk memberi pengawasan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian waduk sehingga dapat berumur panjang.

Keberadaan waduk harus dapat memberikan lapangan pekerjaan/dapat menambah penghasilan serta dapat mensejahterakan masyarakat OTD di lingkungan Waduk Jatigede. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat sangat diperlukan, misalnya melalui pelatihan, sehingga masyarakat mempunyai keterampilan yang sesuai dengan potensi lahan yang baru. Selain itu perlu penataan zonasi atau pembagian wilayah penangkapan ikan bagi nelayan, agar tidak terjadi konflik perebutan lahan mata pencaharian.

Infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana perlu diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga dapat menunjang kegiatan usaha masyarakat OTD baik dalam penangkapan ikan maupun daerah wisata. Penataan di pinggiran waduk seperti pembangunan jogging dan jalur hijau, sehingga menjadi bersih dan rapih agar keberadaan waduk ini menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat OTD. Menurut Sambrani (2014) *dalam* Simanjuntak dan Mahida (2015), ketersediaan infrastruktur yang

berkualitas merupakan sebuah keharusan agar pembangunan ekonomi yang cepat dapat tercapai serta membutuhkan investasi yang terus menerus.

SIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik internal perangkat desa dan kecamatan di wilayah yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede adalah mayoritas kisaran umurnya berada pada kisaran umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 42%. Persepsi perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan waduk . dinilai membawa dampak yang tidak menguntungkan terhadap masyarakat, hal ini terkait dengan hilangnya beberapa sumber pendapatan mereka. harapan masyarakat terhadap keberadaan waduk Jatigede yaitu terjadinya pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat perlu secepatnya/segera dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Sumedang. Pemerintah harus segera mencari solusi bagi masyarakat OTD dalam perubahan sosial mata pencaharian, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang luas yang sesuai dengan potensi lahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyanto. 2011. *Metode Konstruksi Bendungan*. Jakarta (ID): Penerbit Universitas Indonesia.
- Hafizianor. 2009. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Sekitar DAS terhadap Terjadinya Banjir di Kabupaten Tanah Laut." *Jurnal Hutan Tropis Borneo* 10(27).
- Harliani, Fanni. 2014. "Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir." *Journal of Regional and City Planning* 25(1):39–58.
- Heriyanto. 2014. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY [Skripsi]." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purnama, Yuzar. 2015. "Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakatnya." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 7(1):131.
- Puspitawati, H. dan T. Herawati. 2013. *Metode penelitian keluarga*. Bogor (ID): IPB Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung (ID): Remaja Rosdakarya.
- Rostiyati, Ani. 2014. "Upacara Tradisional pada Masyarakat Tradisional Jatigede Kabupaten Sumedang. Bandung." Hal. 28–57 in *Bunga Rampai Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumedang*, diedit oleh M. Muhsin dan B. Rudito. Bandung (ID): Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.
- Saifuddin, Azwar. 2007. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Schermerhorn, John R., J. G. Hunt, dan R. N. Osborn. 2010. *Organizational Behavior*. John Wiley & Sons.
- Simanjuntak, Dicky Fransisco dan Masmian Mahida. 2015. "Dampak Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Jatigede." *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 7(3):161–71.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung (ID): Alfabeta.